

BAB II

DINAMIKA HUBUNGAN INDIA – CHINA

DALAM KONTEKS KEPEMIMPINAN NARENDRA MODI

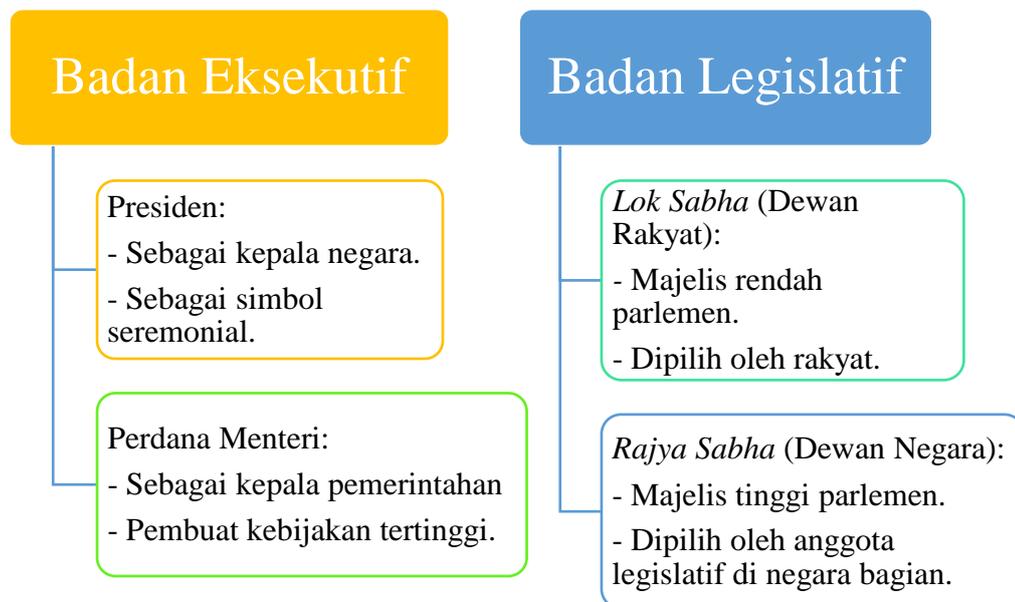
Sebagai dua negara yang terletak di Benua Asia, India dan China diketahui memiliki jejak historis yang panjang dan unik. Keduanya sering disebut memiliki standar ganda dalam kebijakan luar negerinya, karena bisa menjalankan berbagai kerja sama. Tetapi di lain sisi juga dihadapkan dengan berbagai konflik dan sengketa. Pada Bab 2 ini, peneliti akan membahas latar belakang dari dinamika hubungan India dan China sebagai bukti perkembangan relasi. Lebih lengkapnya, peneliti akan membagi penjelasan pada Bab 2 ini ke dalam beberapa bagian, yaitu pertama membahas mengenai kebijakan Luar Negeri India, utamanya di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, selanjutnya membahas dinamika hubungan India dan China dalam konteks kebijakan luar negeri, dan terakhir mengenai kebijakan Pemblokiran Aplikasi asal China di India.

2.1. Kebijakan Luar Negeri India

India (*Bharat Gan Rajya*), negara yang beribukotakan di New Delhi, merupakan sebuah negara yang terletak di Benua Asia Selatan dan berbatasan langsung dengan China di bagian utara. Menjadi salah satu negara dengan peradaban tertua di dunia, India mendapatkan kemerdekaannya dari kolonialisme Britania Raya, pada tanggal 15 Agustus 1947. India kemudian menjadi negara Republik Demokratik dengan sistem parlementer (india.gov.in, n.d.). Dengan sistem parlementer ini, India merupakan negara yang dipimpin oleh seorang

Presiden sebagai symbol seremonial dan kepala negara, serta Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Pada pelaksanaannya, system pemerintahan di India menganut system bicameral atau dua kamar, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat. Yang juga terbagi dalam badan eksekutif, legislative, dan yudikatif. Dimana pada badan legislative, terbagi atas dewan rakyat atau yang disebut sebagai *Lok Sabha* dan dewan negara yang disebut sebagai *Rajya Sabha* (Kaushik & Pal, 2012).

Gambar 2.1. Badan Eksekutif dan Legislatif India.



Sebagai salah satu negara demokratis terbesar di dunia, India menggunakan system pemilihan umum langsung dari warga negaranya untuk memilih perwakilan rakyat di kursi parlemen. Sejak masa kemerdekaannya di tahun 1947, India ingin menjadi negara yang bebas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi untuk keberlangsungan pemerintahan negaranya. Termasuk juga dalam memilih pemimpin dan perwakilan rakyat di India. Di India sendiri, pemilihan umum

dilaksanakan untuk memilih para-Dewan Rakyat atau yang disebut sebagai *Lok Sabha*.

Peran *Lok Sabha* ini akan sangat penting, karena nantinya mayoritas suara mereka yang akan digunakan untuk memilih Perdana Menteri. Seperti Perdana Menteri India sekarang, yaitu Modi, yang merupakan bagian dari partai terbesar di *Lok Sabha*. Berbeda dengan Perdana Menteri, Presiden di India dipilih oleh Dewan Negara atau yang disebut dengan *Rajya Sabha*. Sama seperti presiden, para anggota dari *Rajya Sabha* ini juga tidak dipilih langsung oleh rakyat. Melainkan oleh para anggota legislative yang ada di masing-masing wilayah negara bagian di India.

Sebagai negara dengan sistem parlementer, keputusan tertinggi dan pengambilan kebijakan di India berada di tangan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Hal ini tentunya melewati dan melalui beberapa tahap, termasuk juga peran penting dari *Lok Sabha* sebagai dewan rakyat yang memiliki banyak andil dalam pembuatan dan pengambilan kebijakan di India. Selain itu, Perdana Menteri juga berkewajiban untuk memberikan laporan terkait segala sesuatu yang berkaitan dengan kenegaraan kabinet.

Hal ini juga berkaitan dengan pasal 78 dari Konstitusi India, mengenai peran dan kewajiban dari seorang Perdana Menteri di India, utamanya sebagai kepala penasihat presiden. Melalui perannya sebagai kepala pemerintahan, seorang perdana menteri di India memiliki kekuasaan eksekutif, legislative, dan tentunya diplomatic. Kekuasaan tersebut juga tentunya berkaitan dengan bagaimana seorang perdana menteri mengambil keputusan, baik dalam tingkat nasional, maupun internasional. Termasuk juga peran pentingnya dalam membentuk sebuah

kebijakan luar negeri. Selain itu, dalam merumuskan kebijakan luar negeri, Perdana Menteri tentunya juga melakukannya bersamaan dengan Kementerian Luar Negeri, dan tentunya dengan pertimbangan dari entitas terkait.

Berbicara mengenai peran Perdana Menteri dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan luar negeri, India merupakan negara yang dikenal dengan berbagai ciri khas dari Perdana Menterinya dari masa ke masa. Termasuk juga pada masa kepemimpinan Shri Narendra Modi, yang dikenal memiliki karakteristik tersendiri dalam kebijakan luar negerinya. Kedekatannya dengan negara-negara di dunia, perannya dalam upaya memajukan India, dan partisipasinya dalam mengikutsertakan India ke dalam berbagai kegiatan di kancah internasional.

Sebagai Perdana Menteri India yang telah menjabat selama belasan tahun, Shri Narendra Modi memiliki corak yang menarik perhatian dunia pada masa jabatannya. Kebijakannya banyak mengedepankan kepada pertumbuhan ekonomi, Pembangunan infrastruktur, dan kemandirian India. Ia dikenal dengan berbagai inisiasi pada kebijakan dalam dan luar negerinya, termasuk juga *Atmanirbhar Bharat Abhiyaan*, *Swachh Barat*, *Make in India*, *Digital India*, dan masih banyak lainnya lagi (Pradhanmantri Sangrahalaya, n.d.).

Pada masa jabatannya, Shri Narendra Modi telah menginisiasikan berbagai kebijakan luar negeri dan aktif berperan dalam dunia internasional. Inisiatif kebijakan luar negeri Shri Modi telah menyadari potensi dan peran sebenarnya dari negara demokrasi terbesar di dunia. Dia memulai masa jabatan pertamanya di hadapan semua Kepala Negara SAARC dan mengundang para pemimpin BIMSTEC pada awal masa jabatan kedua. Pidatonya di Majelis Umum PBB

mendapat apresiasi di seluruh dunia. Shri Modi menjadi Perdana Menteri India pertama yang memulai kunjungan bilateral ke Nepal setelah 17 tahun, ke Australia setelah 28 tahun, ke Fiji setelah 31 tahun, dan UEA serta Seychelles setelah 34 tahun (PMINDIA, n.d.). Sejak menjabat, Shri Modi menghadiri KTT PBB, BRICS, SAARC dan G-20, dimana intervensi dan pandangan India terhadap berbagai isu ekonomi dan politik global mendapat apresiasi luas (PMINDIA, n.d.).

2.2. Dinamika Hubungan India – China dalam Konteks Kebijakan Luar Negeri

Pada sub bab ini, peneliti akan menjelaskan beberapa gambaran dari dinamika kerja sama antara India dan China dari masa ke masa, utamanya dalam konteks kebijakan luar negeri. India dan China pertama kali memulai hubungan diplomatiknya di era setelah kemerdekaan sejak tahun 1950. Secara historis, hubungan keduanya banyak disebutkan dan digambarkan oleh China sebagai “*Hindi Chini Bhai Bhai*” atau “*Indians and Chinese are Brothers*”, yang berarti India dan China digambarkan sebagai dua negara yang bersaudara (Weidong, 2020).

India diketahui menjadi negara non-sosialis pertama yang menjalin kerja sama dengan China dengan membangun hubungan diplomatik secara resmi pada tanggal 1 April tahun 1950 (Odgen, 2022, p. 213). Bukti kedekatan dari kedua negara ini juga kemudian semakin diperkuat sejak terjalinnya hubungan diplomatik di tahun 1950 dan ditandai dengan kedekatan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dengan Zhou Enlai. Bersamaan dengan dikeluarkannya gagasan *Hindi – Chini Bhai Bhai*, kedua negara juga menetapkan *Panchsheel Agreement* yang merupakan

perjanjian dengan 5 prinsip kerja sama dengan berlandaskan perdamaian di tahun 1954 (Odgen, 2022, p. 213).

Gambar 2.2. Zhou Enlai dan Jawaharlal Nehru



Sumber: (Noorani, 2015)

Premier Zhou diketahui kerap kali berkunjung ke India secara langsung untuk meresmikan pernyataan kerja sama di antara kedua negara di Asia ini. Kunjungan pertama Zhou ke India di tahun 1954 menjadi awal mula kedekatan kedua negara. Pernyataan kerja sama tersebut dikenal juga dengan sebutan *Panchsheel Agreement*, sebagai salah satu wujud dari slogan “*Hindi Chini Bhai Bhai*”. Mengutip dari artikel yang dituliskam oleh Chris Ogden, di dalamnya juga memuat 5 prinsip kerja sama damai secara berdampingan antara India dan China (Odgen, 2022, p. 213). 5 prinsip yang dijadikan salah satu acuan dari kerja sama antara India dan China tersebut di antaranya berisikan:

1. Menghormati integritas dan kedaulatan territorial di antara dua negara.
2. Menghindari penggunaan kekuatan militer dalam urusan di antara kedua negara.
3. Tidak ikut campur urusan internal di antara kedua negara.

4. Kesetaraan dan kebaikan bersama.
5. Menciptakan lingkungan kerja sama berasaskan pembangunan dan tujuan modernisasi bersama.

Di tahun yang sama, Perdana Menteri Nehru juga berkunjung ke Peking dan banyak berdiskusi mengenai hubungan di antara kedua negara. Termasuk juga kunjungan India dan China ke Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, sebagai wujud kerja sama, hubungan baik, dan solidaritas negara sesama Asia setelah masa kolonialisme.

Banyak dari entitas dalam dunia hubungan internasional mengetahui bahwa India dan China memiliki hubungan yang unik dan berbeda. Keduanya di anggap memiliki hubungan bagai pedang dengan dua mata pisau. Di satu sisi keduanya memiliki hubungan yang erat, namun di sisi lain juga masih banyak diselimuti oleh konflik dan perselisihan. Dalam diskursus hubungan internasional, banyak pembahasan mengenai bagaimana potensi sinergi di antara India dan China. Namun kenyataannya, kita mengetahui bahwa kedua negara ini sering kali terlibat dalam perdebatan dan memiliki pandangan berbeda dalam dunia internasional, hingga berujung konflik. Hubungan India dan China telah berada dalam siklus konflik dan kerja sama selama hampir 75 tahun. Konflik paling parah baru-baru ini terjadi di Lembah Galwan di Ladakh pada tahun 2020 dan di Tawang di Arunachal Pradesh pada tahun 2022.

Gambar 2.3. Perbatasan India dan China



Sumber: (Bajpai, 2023)

Sengketa di antara India dan China saat kedudukan China di Tibet di tahun 1950 yang dianggap menjadi kontak fisik dan perselisihan pertama kali antara keduanya (Cheng, 2009). Selain serangan yang dilakukan China di Tibet, konflik juga semakin meningkat ketika pasukan militer China menyerang India di daerah perbatasan sekitaran Pegunungan Himalaya pada tahun 1962. Peristiwa ini juga dikenal sebagai peristiwa konflik yang sangat melukai India, atau juga biasa dikenal dengan istilah *The Sino – Indian War* atau Perang India – China. Hal ini tentunya dianggap sangat melukai India, utamanya PM Nehru yang telah lama mempercayai China sebagai negara tetangga yang memiliki hubungan baik dengan India.

Bukan hanya terjadi di tahun 1962, perselisihan keduanya di perbatasan wilayah juga berlanjut bahkan hingga di tahun 2020. Kedua negara tersebut masih terlibat konflik terkait dengan wilayah perbatasan. Termasuk juga konflik yang terjadi di Lembah Galwan, di Pegunungan Himalaya, yang melibatkan tentara India dan China di wilayah perbatasan. Konflik ini dimulai ketika tentara China dianggap

melakukan konfrontasi terhadap tentara India. Meskipun negosiasi hampir tidak terputus di perbatasan mereka sejak tahun 1981, India dan China belum menentukan LAC dan mencapai kesepakatan akhir di wilayah ini.

Hubungan di antara India dan China sempat dianggap gagal oleh karena banyaknya konflik yang terjadi, utamanya setelah masa jabatan Perdana Menteri Nehru, yang dianggap menjadi era keterpurukan hubungan India dan China (Jaim, 2007). Setelah beberapa kali berganti Perdana Menteri di India, hubungan antara India dan China masih belum juga mendapatkan kepastian dan dihadapkan dengan pilihan yang sulit oleh karena peristiwa yang terjadi di perbatasan kedua negara tersebut. Namun, hubungan kedua negara kemudian mulai diperbaiki kembali pada masa jabatan Indira Ghandi.

Kemudian hubungan kedua negara dianggap memasuki era baru di bawah naungan Perdana Menteri Rajiv Gandhi (Jaim, 2007, p. 257). Memasuki masa tersebut, hubungan India dan China dianggap bisa kembali terjalin dengan baik. Hal ini juga diperkuat dengan kunjungan diplomatic Perdana Menteri Gandhi ke Beijing di bulan Desember tahun 1988, sebagai pertanda dimulainya era dan fase baru dalam hubungan dari India dan China (Jaim, 2007, p. 257). Dilanjutkan dengan tahun 1996, yaitu saat Presiden Jiang Zemin mengunjungi India untuk membahas mengenai hubungan bilateral antara China dengan India, termasuk juga kemitraan di bidang ekonomi, militer, dan perbatasan wilayah (Weidong, 2020).

Hubungan yang kembali terjalin ini kemudian dapat dibuktikan dengan total 16 perjanjian ditandatangani di berbagai bidang, termasuk perdagangan dan perdagangan, perkeretaapian, kerja sama luar angkasa, industri farmasi, pendirian

kawasan industri, dan organisasi kota kembar. Kedua belah pihak juga menandatangani MoU untuk membuka rute Nathu untuk Kailash Mansarovar Yatra. Perdana Menteri Narendra Modi kemudian juga mengunjungi Tiongkok di Bulan Mei 2015 dan bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang. Dalam kunjungan tersebut, Perdana Menteri Modi dan Perdana Menteri Li Keqiang juga membahas pembukaan Forum Pemimpin Negara/Provinsi pertama di Beijing. 24 perjanjian ditandatangani di pihak pemerintah, 26 nota kesepahaman di pihak oposisi perusahaan dan dua deklarasi bersama, salah satunya tentang perubahan iklim. Perdana menteri juga mengumumkan kemungkinan visa elektronik untuk turis China.

Gambar 2.4. Perdana Menteri Modi dan Presiden Xi di Wuhan



Sumber: (Weidong, 2020)

Tahun 2018, hubungan bilateral semakin kuat. Pada April 2018, Perdana Menteri Modi dan Presiden Xi mengadakan KTT informal pertama di Wuhan untuk bertukar isu bilateral dan global yang luas dan menyampaikan pandangan dan prioritas

mereka untuk pembangunan nasional. Kedua kepala negara dan pemerintahan sepakat untuk secara signifikan mempercepat upaya pemulihan hubungan melalui mekanisme yang ditetapkan untuk menciptakan basis hubungan seluas mungkin. Dialog tersebut akan membantu mengembangkan pemahaman bersama tentang arah masa depan hubungan China-India, dengan saling menghormati upaya pembangunan satu sama lain dan pengelolaan perbedaan yang bijak.

Kemudian, penguatan dan pendalaman hubungan bilateral berlanjut pada tahun 2019 dengan KTT informal kedua antara Perdana Menteri Modi dan Presiden Xi di Chennai pada 11-12 Oktober 2019. KTT informal kedua secara positif menilai arah hubungan bilateral dan menjajaki peluang untuk memperkuat interaksi bilateral antara India dan Cina, yang mencerminkan meningkatnya peran kedua negara di panggung global (Weidong, 2020). Kedua pemimpin dari India ini juga kerap kali mengunjungi kedua negara dan juga seringkali menghadiri pertemuan multilateral di berbagai bidang, sebagai wujud nyata keseriusan untuk kembali mempererat hubungan diplomatic dan hubungan kerja sama lainnya.

Selain dari hubungan diplomatic sebagai wujud dari normalisasi hubungan antara kedua negara tersebut, India dan China juga banyak menjalin kerja sama lainnya. Kerja sama ekonomi dan perdagangan khususnya, yang menjadikan hubungan kedua negara ini bisa lebih damai dan kooperatif. Kedua negara sama-sama memiliki tujuan pembangunan dalam bidang perekonomiannya, utamanya New Delhi yang sedang meningkatkan perlindungan terhadap integritas pasar domestic dan sumber daya mentah yang tersedia di negaranya (Odgen, 2022). Ekspansi perdagangan bilateral yang cepat antara India dan China sejak pergantian

abad menjadikan China mitra dagang terbesar India pada tahun 2008, posisi yang dipertahankan China hingga hari ini. Pada 2017 dan 2018, perdagangan bilateral tumbuh dengan laju dua digit yang kuat. Pada 2019, India adalah mitra dagang terbesar ke-12 China (Indian Government, 2020).

Karena dampak pandemi, total perdagangan dengan China turun 13,1% (\$60,5 miliar) pada Januari-September 2020 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 (\$69,7 miliar). Sementara pertumbuhan perdagangan membawa semua manfaat seperti ketersediaan barang dengan harga terendah di India. Beberapa perusahaan India telah mendirikan anak perusahaan di China untuk melayani pelanggan India dan multinasional mereka di China. Mereka beroperasi baik sebagai kantor perwakilan, sebagai *Whole Foreign Enterprise (WFOE)* atau sebagai perusahaan kerja sama. Perusahaan China memasuki manufaktur dan layanan TI dan yang mendukung TI, perdagangan, perbankan, dan aktivitas terkait.

Perusahaan India terkemuka di China termasuk Dr. Reddy Laboratories, Aurobindo Pharma, Matrix Pharma, NIIT, Infosys, TCS, APTECH, Wipro, Mahindra Satyam, Kemasan Essel, Suzlon Energy, Reliance Industry, SUNDARAM Fasteners, Mahindra & Mahindra, Putra TATA, Semen Binani, dan masih banyak lainnya. Selain dari kerja sama bilateral di antara India dan China tersebut, kita mengetahui juga bahwasanya India dan China juga tergabung ke dalam beberapa kerja sama multilateral dan regional dalam bidang ekonomi, termasuk juga BRICS, yaitu kerja sama ekonomi antara Brazil, Russia, India, China, dan Afrika Selatan.

2.3. Kebijakan Pemblokiran Aplikasi asal China di India

Terlepas dari bagaimana India dan China mempertahankan hubungan baiknya, kedua negara ini memang tidak pernah sepenuhnya “damai” hingga saat ini. Seperti yang telah dibahas pada sub-bab sebelumnya, tepatnya mengenai konflik yang terjadi antara India dan China di perbatasan wilayah, tepatnya di Lembah Galwan yang dekat dengan Pegunungan Himalaya. Pada tanggal 15 Juni 2020, terjadi konfrontasi antara pasukan India dan Tiongkok yang mengakibatkan tewasnya dua puluh tentara India, sementara jumlah korban Tiongkok tidak dapat dipastikan. Bentrokan ini merupakan bagian dari ketegangan perbatasan yang lebih luas yang terjadi di sepanjang Sungai Galwan, di Garis Kontrol Aktual, yang hingga saat ini belum terselesaikan (Gokhale, 2021).

Perselisihan yang kembali terjadi di perbatasan wilayah tersebut menjadi semacam “pemanantik” terhadap hubungan India dan China yang tidak sepenuhnya stabil. Peristiwa tersebut menjadi salah satu dari banyaknya latar belakang yang membuat India mengeluarkan kebijakan terkait dengan pemblokiran aplikasi asal China tersebut. Dalam konteks ketegangan perbatasan dengan China, pemerintah India juga mengkhawatirkan potensi ancaman keamanan nasional yang mungkin timbul dari aplikasi yang dapat memantau dan mengumpulkan informasi sensitif tentang warga negara India. Mereka memandang pemblokiran aplikasi ini sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi risiko potensial. Pemerintah India memberikan pernyataan resmi mengenai bagaimana, aplikasi asal China ini melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan privasi mengenai data terhadap penggunaannya di India.

Gambar 2.5. Pemblokiran Aplikasi China di India



Sumber: (Jing, Qiu, & Woo, 2022)

Kebijakan ini pertama kali dikeluarkan pada bulan Juni 2020, oleh Pemerintah India yang melarang kurang lebih 59 Aplikasi asal China, yang kemudian bertambah seiring berjalannya waktu, termasuk juga aplikasi TikTok yang memiliki pengguna terbesar di India, kemudian UC Browser, WeChat, dan masih banyak lainnya lagi. Banyaknya aplikasi tersebut selain dianggap melanggar privasi, juga dapat membahayakan kedaulatan dan integrasi nasional. Di bulan September tahun 2020, pemerintah mengumumkan larangan tambahan, termasuk juga kepada AliExpress, PUBG Mobile, dan 114 aplikasi lainnya.

Pada awal mula kebijakan pelarangan ini, pemerintah India memberikan kesempatan kepada 59 aplikasi tersebut untuk menjelaskan posisi mereka mengenai pemenuhan persyaratan privasi dan keamanan, seperti yang dilaporkan oleh Times of India pada hari Senin (Reuters, 2021). Perusahaan-perusahaan tersebut, termasuk aplikasi berbagi video populer TikTok yang dimiliki oleh ByteDance, WeChat milik Tencent Holdings (0700.HK), dan UC Browser milik Alibaba (9988.HK), juga diminta untuk memberikan tanggapan terhadap sejumlah pertanyaan, seperti

yang disampaikan oleh surat kabar tersebut. Hal ini dilakukan untuk memperkuat alasan dalam pemblokiran aplikasi asal China tersebut. "Pemerintah tidak puas dengan respons atau penjelasan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan ini. Oleh karena itu, larangan terhadap 59 aplikasi ini sekarang bersifat permanen," seperti yang dikutip oleh surat kabar bisnis Livemint.

India mungkin menjadi negara pertama yang melarang aplikasi-asal China, tetapi bukan yang pertama yang menyuarakan keprihatinan terkait privasi dan keamanan. Kementerian Teknologi Informasi telah menerima sejumlah keluhan dari berbagai sumber, termasuk beberapa laporan tentang penyalahgunaan beberapa aplikasi seluler yang tersedia di platform Android dan iOS untuk mencuri data pribadi secara tidak sah dan mengirimkannya ke server yang berlokasi di luar India. Hal ini telah diperiksa oleh pemerintah ketika lokasi server tersebut berada di luar negeri (Ban on Chinese Apps: Need and Impact, 2020).

Pemerintah menyatakan bahwa "pengumpulan, penambangan, dan pembuatan profil dari data ini oleh pihak-pihak yang bertentangan dengan keamanan nasional dan pertahanan India, yang pada akhirnya dapat berdampak serius pada kedaulatan dan integritas India," merupakan hal yang sangat memprihatinkan dan mendesak, sehingga memerlukan tindakan darurat. Inilah alasan utama mengapa Pemerintah memutuskan untuk melarang penggunaan beberapa aplikasi tersebut, yang digunakan baik pada perangkat seluler maupun perangkat Internet yang tidak seluler. Juru bicara pemerintah juga menyatakan bahwa Google Play Store dan Apple App Store telah diberi instruksi untuk menghapus aplikasi-aplikasi tersebut.

Selain pemblokiran aplikasi, India juga mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap aplikasi asal China dan perusahaan teknologi China yang beroperasi di India. India juga mendorong pengembangan aplikasi dalam negeri melalui inisiatif "*Atmanirbhar Bharat*" (Self-Reliant India). Selain itu, India telah mendorong pengembangan aplikasi dalam negeri melalui inisiatif yang dikenal sebagai "*Atmanirbhar Bharat*" atau "Self-Reliant India." Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong ekosistem aplikasi India yang mandiri, dengan mempromosikan pengembangan dan adopsi aplikasi buatan dalam negeri. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mengurangi ketergantungan India pada teknologi dan aplikasi yang berasal dari luar negeri, khususnya China, dalam rangka memperkuat kedaulatan teknologi dan industri digital India.

Gambar 2.6. *ABA App Innovation Challenge*



Sumber: (ET Government, 2020)

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah India ini tentunya menimbulkan berbagai respon dari masyarakat India dan juga Pemerintah China itu sendiri. Berbagai respon, seperti dari Dev Khare, seorang mitra di perusahaan modal ventura Lightspeed India, mengakui bahwa larangan aplikasi di India adalah langkah yang mendapat dukungan dari masyarakat dan memberikan perasaan

positif dalam beberapa hal. Namun di sisi lain, Masyarakat juga banyak yang tidak setuju karena merasa kehilangan lapangan pekerjaan dari kantor-kantor perusahaan aplikasi asal Negeri Tirai Bambu tersebut dan dari aplikasi itu sendiri.

Mengutip dari The New York Times, salah satu pengguna salah satu aplikasi terbesar di India, yaitu Anusmita Dutta merasa kehilangan sumber mata pencahariannya dari *platform* TikTok. TikTok membuatnya merasa terhubung dengan dunia yang lebih luas. Itulah mengapa keputusan India untuk melarang TikTok dan puluhan aplikasi China lainnya begitu mengecewakan. "Bakat nyata berasal dari aplikasi ini di India," kata Dutta. Melihatnya berakhir begitu tiba-tiba adalah "tentu saja sangat mengecewakan" (Zhong & Schultz, 2020).